



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Jampangkulon, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah, yang diajukan oleh:

Solehudin bin Kamsudin, Sukabumi 08 Juni 1972 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kampung Cikaret I RT.003 RW. 007 Desa Mekarjaya Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Aidah binti Eman, Sukabumi 18 Februari 1982 (umur 35 tahun), agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kampung Cikaret I RT.003 RW. 007 Desa Mekarjaya Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor

*Halaman 1 dari 11 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.P/2017/PA.Cbd mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2000 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Eman dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Padli dan Encep dengan mas kawin berupa perhiasan emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda Mati sementara Pemohon II berstatus janda Mati;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Silvalia Nur Atalia, Sukabumi 15 Juni 2011;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Legalitas Hukum Perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Halaman 2 dari 11 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Cbd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Solehudin bin Kamsudin) dan Pemohon II (Aidah binti Eman);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Solehudin bin Kamsudin) dan Pemohon II (Aidah binti Eman) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 01 Maret 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Cbd yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 3202210806720005, tanggal 02 Maret 2013 dan Pemohon II nomor 3202215802820006, tanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, lembar fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3202212408090007, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

*Halaman 3 dari 11 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Cbd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 19 November 2015 lembar fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Majid bin Encup, umur 45 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung pasir Culik RT.005 RW. 007 Desa Mekarjaya Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
2. Encep, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Cisarua RT.001 RW. 007 Desa Mekarjaya Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1.Saksi I Majid, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman kandung Pemohon II;
- Bahwa benar hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2000;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung bernama Eman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama saksi Padli dan Encep dengan mas kawin berupa Perhiasan emas 2 (dua) gram ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda sementara Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

*Halaman 4 dari 11 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I selama membina rumah tangga dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk legalitas hukum pernikahannya;

2. Saksi II Encep, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi sebagai Keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2000 di wilayah Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikahnya adalah paman kandung bernama Eman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Padli dan Encep dengan mas kawin berupa perhiasan emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Duda sementara Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah ini

*Halaman 5 dari 11 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Cbd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk legalitas hukum pernikahannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah dengan alasan dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Jampangkulon, dikarenakan tidak mampu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat terdiri dari P-1 dan P-2 serta dua orang saksi yaitu Padli dan Encep;

Menimbang bahwa setelah Majelis mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas, perlu diteliti terlebih dahulu: apakah perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama atau bukan ? dan apakah Para Pemohon mempunyai kapasitas/*legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo* ?

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu Isbat nikah (Pengesahan nikah) menurut ketentuan hukum Islam, termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan bukti P-1 dan P-2, adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf a point (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

*Halaman 6 dari 11 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Cbd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah (Pengesahan nikah) untuk diri mereka berdua, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai kapasitas/*Legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa *Isbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b). Hilangnya akta nikah, (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d). Adanya perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas, menurut pendapat Majelis dapat dikualifikasikan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya suatu syarat perkawinan, karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan pemohon II, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P-2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta keterangannya tersebut disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing antara keterangan satu dengan yang yang lainnya bersesuaian. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 145 , 146 HIR jo. Pasal 171 HIR keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

*Halaman 7 dari 11 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Cbd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan akad pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 04 Agustus 2000, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Eman disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Padli dan Encep serta adanya ijab qobul yang dilakukan oleh wali dan Pemohon I;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Duda sementara Pemohon II berstatus Janda ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Silvalia Nur Atalia, Sukabumi 15 Juni 2011;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk legalitas hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih

*Halaman 8 dari 11 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : “ Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan yang lalu, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2000, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, oleh karenanya, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara syariat telah sah;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, menurut Majellis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa yaitu karena ketidak mampuan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mendapatkan kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul fiqih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan karenanya

Halaman 9 dari 11 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan angka 37 Pasal 49 huruf a point (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Solehudin bin Kamsudin) dengan Pemohon II (Aidah binti Eman);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Solehudin bin Kamsudin) dengan Pemohon II (Sela binti E Aidah binti Eman man) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 11 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017, bertepatan dengan tanggal 2satu Jumadil Akhir 1438 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. H. Alimuddin, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag. dan Drs. Mustofa Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Alimuddin, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Drs. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ade Rinayanti, S.Ag.

*Halaman 11 dari 11 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Perincian Biaya Perkara</u> :		
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 40.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 281.000,00
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Palabuhanratu, 29 Maret 2017
Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama cibadak

Drs. E. Arifudin

*Halaman 12 dari 11 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Cbd*



*Halaman 13 dari 11 film
Penetapan Isbat Nikah Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Cbd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)